

ABSTRAK

Pekerjaan jasa konstruksi saat ini memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara Indonesia guna penyediaan infrastruktur yang memadai ke seluruh propinsi hingga kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebagai landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi. Setiap tindakan jasa konstruksi harus mengacu pada undang-undang tersebut. Apabila terdapat tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, maka hukuman bagi pelaksana jasa konstruksi dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam penulisan ini memiliki karakter penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penulisan ini memiliki kajian serta analisis terhadap permasalahan hukum pidana jika terjadi perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan jasa konstruksi.

Katakunci : Jasa Konstruksi, perbuatan melawan hukum, sanksi pidana.

ABSTRACT

The current construction work has an important role in the development of the State of Indonesia in order to provide adequate infrastructure to all provinces to districts. In the implementation of construction services, as the legal basis is Law No. 18 of 1999 on Construction Services. The law regulates the organization of construction services. Any construction service act shall refer to the law. If there are any actions that violate the provisions of the law, then the penalty for the executor of the construction service shall be liable to sanctions both administrative sanctions and criminal sanctions as stated in the provisions of Article 42 and Article 43 of Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services . In this writing has the character of normative law writing by using the approach of legislation and conceptual approach. The purpose of this paper has a study and analysis of criminal law problems in case of unlawful acts on the implementation of construction services.

Keywords: Construction Services, unlawful acts, criminal sanctions.